



Realokasi Anggaran Tunggu Juknis

WACANA pengalihan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk penanggulangan virus corona (Covid-19), dipastikan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah (pemda) diminta bersabar.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sulut Ardiles Mewoh mengungkapkan, pihaknya siap mengembalikan sisa anggaran pilkada 2020.



Ardiles Mewoh

► Baca **REALOKASI...** Hal.7

REALOKASI...

Sambungan Dari Hal. 1

Namun, hal itu baru bisa dilakukan setelah pusat mengirimkan petunjuk teknis.

"Kesepakatan di pusat sudah ada tetapi perintah tindak lanjut ke daerah belum ada. KPU Bersama pihak terkait masih melakukan pembahasan lanjutan mengenai dasar aturan. Prinsipnya, kami menunggu untuk segera ditindaklanjuti," tuturnya, semalam.

Pengamat politik Josef Tuerah mengatakan, pengalihan anggaran Pilkada yang ditunda untuk penanggulangan Covid-19 menjadi langkah logis. Namun, dasar aturan harus terlebih dulu dibuat. Agar tidak ada konsekuensi hukum nantinya.

Selain itu, pemerintah dan penyelenggara perlu mempertimbangkan realokasi anggaran pilkada kembali di tahun depan. Bila waktu pelaksanaannya sudah ditetapkan kembali. "Ada potensi anggarannya ditata kembali sama seperti tahun ini karena tahapan bisa saja diulang dari awal. Ini harus diantisipasi agar tidak timpang," tutur dia.

Keputusan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu untuk merealokasi anggaran Pilkada untuk penanganan Covid-19 memang menimbulkan geliat di daerah. Sebagian Pemda bahkan sudah menyampaikan permohonan pengembalian dana. Hal itu diakui Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. Dia mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari jajarannya di daerah. Baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Pada pokoknya, Pemda mulai mengundang KPU untuk membicarakan realokasi anggaran

Terkait undangan itu, Pram menyarankan jajarannya untuk memenuhi undangan. Hanya saja, Pram meminta untuk tidak mengambil keputusan lebih dahulu terkait pengembalian dana. "Jangan menyepakati dulu pemotongan anggarannya," ujarnya dalam diskusi, kemarin (2/4).

Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten itu beralasan, teknis realokasinya belum jelas. Dia khawatir, jika pengembalian anggaran dilakukan lebih dulu, namun ternyata berbeda dengan apa yang diputuskan

ke depannya. "Sebelum ada keputusan dalam Perppu dan Permendagri jangan menyepakati pemotongan anggaran," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, dari sisi hukum, penundaan Pilkada belum disahkan melalui produk hukum resmi seperti perppu. Dengan demikian, secara otomatis yang masih berlaku adalah regulasi yang lama, yakni UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD. Hal senada disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar. Fritz meminta jajaran pengawas mengamankan anggaran yang sudah ada. Baik yang sudah disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) maupun dana yang sudah masuk rekening.

"Harus menunggu Permendagri atau perppu baru," tuturnya. Hal itu bukan berarti pihaknya tidak peduli dengan persoalan corona. Namun demi memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Untuk diketahui, berdasar-

kan data yang dihimpun Kementerian Dalam Negeri, dari Rp 14,4 triliun anggaran yang dialokasikan, sudah Rp 5,2 triliun yang sudah digunakan. Sehingga ada potensi Rp 9,2 triliun yang bisa direalokasi ke penanganan Covid-19.

Sementara itu, peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Ihsan Maulana mengusulkan agar Perppu Pilkada yang nanti disusun pemerintah perlu juga mengatur anggaran. Sehingga sisa anggaran Pilkada yang mencapai 9 triliun dan direalokasikan ke Covid-19 bisa dipastikan kembali. "Perppu perlu menjangkau ketersediaan anggaran sehingga terjamin," ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, akan lebih baik jika anggaran Pilkada di alihkan melalui APBN. Ihsan beralasan, sangat mungkin pembiayaan Pilkada nanti menciptakan perdebatan yang alot di daerah apalagi dilakukan pasca bencana. Berkaca dari sebelumnya, pembahasan di situasi normal saja tidak selesai tepat waktu. "Take over saja di APBN biar tidak ada kendala," pungkasnya. (far/jen)